

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok : Literature Review

Factors Affecting the Implementation of Smoking-Free Area Policies : Literature Review

Fariz Kahendra^{1*}, Bagoes Widjanarko², Farid Agushyana³

^{1,2,3}Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

*Korespondensi Penulis : farizkahendra@students.undip.ac.id

Abstrak

Latar Belakang: Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang di nyatakan di larang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk-produk tembakau. Di Indonesia rokok masih menjadi permasalahan penting yang harus segera diatasi. Mengingat dampak dari rokok tidak hanya memberikan dampak buruk bagi kesehatan tetapi juga berdampak pada beberapa aspek penting lainnya seperti ekonomi dan sosial. Dari beberapa permasalahan yang terjadi karena dampak dari rokok, membuat pemerintah mengeluarkan UU no 36 tentang instruksi memberlakukan KTR di wilayah kerja masing masing pemerintah daerah. Dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari paparan asap rokok dan memberikan rasa nyaman dalam menghirup udara segar.

Tujuan: Tinjauan pustaka ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok.

Metode: Metode yang digunakan dalam Menyusun artikel ini adalah literature review, pencarian artikel di ini menggunakan google scholar, dengan kata kunci “kawasan tanpa rokok, kebijakan kawasan tanpa rokok dan perilaku merokok”. Artikel yang ditemukan dalam pencarian sebanyak 2050 artikel, kemudian dievaluasi kembali sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sehingga akhirnya tersedia 5 artikel yang dapat direview.

Hasil: Penelaah ditemukan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu peyampaian informasi, kejelasan informasi, sumber daya, komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, perilaku merokok dan pengetahuan tentang peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

Saran: Disarankan untuk membuat standar operasional prosedur (SOP) dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok serta membentuk komite atau tim khusus agar sebuah kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok; Kebijakan; Rokok

Abstract

Introduction: A smoke-free area is a room or area that is declared prohibited for smoking activities or activities for producing, selling, advertising or promoting tobacco products. In Indonesia smoking is still an important problem that must be addressed immediately. Given the impact of smoking not only has a bad impact on health but also has an impact on several other important aspects such as economic and social. Of the several problems that occurred due to the impact of smoking, the government issued Law No. 36 concerning instructions for implementing KTR in the work areas of each regional government. The enactment of this policy is to protect Indonesian people from exposure to cigarette smoke and provide a sense of comfort in breathing fresh air.

Purpose: This literature review is to determine the factors that influence the implementation of smoking-free area policies.

Method: The method used in compiling this article is literature review, searching for articles in this using Google Scholar, with the keywords "smoking areas, smoking-free area policies and smoking behavior". There were 2050 articles found in the search, which were then re-evaluated according to predetermined inclusion and exclusion criteria so that finally 5 articles were available for review.

Results: The reviewers found that the implementation of smoking-free area policies was heavily influenced by several factors, namely information delivery, information clarity, resources, communication, disposition, bureaucratic structure, smoking behavior and knowledge of smoking-free regional regulations.

Suggestion: It is recommended to make a standard operating procedure (SOP) in implementing smoking-free area policies and to form a special committee or team so that a policy can run effectively and efficiently.

Keywords: Non-Smoking Areas; Policy; Cigarette

PENDAHULUAN

Merokok adalah salah satu perilaku yang merugikan bagi kesehatan, baik bagi perokok itu sendiri maupun orang yang terpapar asap rokok. Di dalam sebatang rokok terdapat 4.000 zat kimia yang merugikan bagi tubuh manusia. Dari beberapa zat yang terdapat di sebatang rokok zat kimia yang paling berbahaya bagi tubuh yaitu, tar, nikotin dan karbon (1), (2). Berdasarkan data WHO lebih para perokok aktif di seluruh dunia mencapai 1 miliar lebih, dan dapat membunuh 10 juta lebih manusia di dunia pada tahun 2020. Jumlah perokok di dunia pada tahun 2013 mengalami peningkatan 84% dan mayoritas berasal dari negara berkembang seperti Indonesia (3).

Berdasarkan data WHO tahun 2020, sekitar 7 juta orang di dunia meninggal akibat rokok. 7 juta orang meninggal dikarenakan dampak sebagai perokok aktif dan 1,2 juta orang meninggal karena terpapar asap rokok. Rokok juga berdampak dari aspek asuransi, sebagai contoh BPJS membiayai 20% dari penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung koroner dan stroke. Pembiayaan BPJS Kesehatan pada tahun 2018 menghabiskan dana sebesar Rp.10,5 triliun untuk penyakit jantung, Rp.3,4 triliun untuk penyakit kanker dan Rp.2,5 triliun untuk penyakit stroke (4).

Di Indonesia rokok masih menjadi permasalahan penting yang harus segera diatasi. Mengingat dampak dari rokok tidak hanya memberikan dampak buruk bagi kesehatan tetapi juga berdampak pada beberapa aspek penting lainnya seperti ekonomi dan sosial. Selain merugikan diri sendiri, asap rokok sangat merugikan bagi orang disekitarnya atau perokok pasif. Pada rokok terdapat dua jenis asap rokok yang masing masing berdampak buruk bagi kesehatan yaitu pada asap rokok yang keluar dari mulut memiliki 25% sifat bawaan rokok dan asap yang kedua yaitu asap rokok sampingan atau biasa disebut side stream yang lebih banyak mengandung zat kimia sekitar 75% dari isi kandungan pada rokok yang berisi lebih dari 4000 senyawa kimia dan 10% dari zat tersebut merupakan zat yang dapat mengakibatkan kanker (5),(6).

Salah satu negara yang memiliki penduduk yang merokok dengan presentase tinggi adalah Indonesia. Sekitar 60 juta penduduk Indonesia adalah perokok aktif. Semakin hari jumlah perokok aktif di Indonesia semakin bertambah dan menjadikan Indonesia menjadi negara peringkat tiga dengan jumlah perokok aktif terbanyak. Diperkirakan 330 miliar telah dihabiskan masyarakat Indonesia untuk membeli rokok dalam sehari dan hal tersebut berdampak pada 65,6 juta perempuan dan 43 juta anak-anak di Indonesia terpapar asap rokok. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Indonesia menjadi berada di peringkat pertama di ASEAN dengan jumlah perokok aktif terbanyak yaitu sebesar 46,16% (7).

Saat ini merokok tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, banyak ditemukan anak-anak yang sudah menjadi perokok aktif di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi anak-anak merokok adalah banyaknya iklan rokok di media cetak bahkan di televisi. Berdasarkan beberapa studi menunjukkan iklan menyebabkan anak usia dini dan remaja untuk memulai merokok, 77% mengaku mereka merokok karena tertarik dengan ajakan iklan dan mendorong mereka untuk terus merokok (8).

Dari beberapa permasalahan yang terjadi karena dampak dari rokok, membuat pemerintah mengeluarkan UU no 36 tentang instruksi memberlakukan KTR di wilayah kerja masing masing pemerintah daerah. Tujuan dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari paparan asap rokok dan memberikan rasa nyaman dalam menghirup udara segar. Kebijakan tersebut dapat menurunkan paparan asap rokok sekitar 80-90% pada tempat-tempat yang mempunyai intensitas tinggi asap rokok. Selain mengeluarkan UU tentang KTR, pemerintah mengeluarkan peraturan bersama Menteri kesehatan dan Menteri hukum tentang pedoman pelaksanaan KTR. Dalam peraturan tersebut menjelaskan KTR wajib diterapkan di tempat-tempat umum yang tertulis pada ayat 3 pasal 1 yaitu tempat ibadah, tempat bermain anak, sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja dan tempat umum lainnya (9).

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis ingin membuat literature review yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kawasan tanpa rokok dari beberapa penelitian terdahulu.

METODE

Metode penelusuran dalam literatur review ini menggunakan *PEOS framework* yang terdiri dari P (*population/problem*) yaitu SMP dan SMA, E (*Exposure*): Kawasan tanpa rokok, O (*Outcome*): Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok, S (*Study Design*): studi kohort, *cross sectional*. Metode yang digunakan dalam literatur review ini dengan pencarian artikel nasional maupun internasional dengan penelusuran internet dari database *Google Scholar* atau *Google Cendekia*. Pada tahap awal pencarian artikel jurnal diperoleh 2980 artikel, penelusuran dibatasi terbitan tahun 2016-2021 dengan menggunakan kata kunci kawasan tanpa rokok, kebijakan KTR dan perilaku merokok. Kemudian diseleksi berdasarkan tahun terbit artikel yaitu 2016-2022 maka ditemukan 2050 artikel, kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian populasi maka tersisa 14 artikel. Kemudian diseleksi kembali berdasarkan desain penelitian tersisa 5 artikel. Artikel yang digunakan sebagai

sampel selanjutnya diidentifikasi sesuai analisis topik, tujuan, sampel, metode penelitian, hasil penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel.

HASIL

Table 1. Karakteristik Artikel Penelitian

Peneliti	Judul	Tujuan	Karakteristik Sampel	Metodologi Penelitian	Hasil
Yulyana Kusuma Dewi (2018) (10)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang	Mengetahui efektifitas peraturan daerah berdasarkan analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pegawai pada pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor Satpol PP	Jumlah sampel sebanyak 158 pegawai diambil berdasarkan accidental sampling	Penelitian kuantitatif dan desain cross sectional	Implementasi kebijakan belum berjalan efektif dengan dibuktikan rendahnya kepatuhan pegawai dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok.dengan persentase 30.4% dengan hasil p value 0,000 yang artinya terdapat pengaruh antara pengetahuan, tanda larangan merokok, penetapan sanksi dan dukungan atasan terhadap kepatuhan pegawai terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok.
Siti Nahdiah (2021) (11)	Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Smpn 2 Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2021	Untuk menganalisis penerapan strategi KTR di SMPN 2 Lampihong,	Sampel berjumlah 68 siswa siswi SMPN 2 Lampihong	Penelitian kuantitatif dan desain cross sectional	Tidak ada hubungan antara kejelasan informasi KTR dengan penerapan kebijakan KTR dengan p value+0,232. Ada hubungan penyampaian informasi dengan penerapan kebijakan KTR dengan p value+0,002
Indah Pratiwi (2016) (12)	Analisis Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang KTR di Kota Semarang	Untuk menganalisis penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 3 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Tembakau di SMA di Kota Semarang.	Sampel diambil dari 16 kecamatan dengan jumlah 98 orang	Penelitian explanatory research dan desain cross sectional	P value disetiap variabel adalah 0,001 yang artinya ada hubungan bermakna antara komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi dengan penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Tembakau
Nofrianto Mantiri, (2018) (13)	Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dengan Tindakan Merokok Siswa Di Smk Negeri 2 Manado	Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang kebijakan kawasan tanpa rokok dengan tindakan merokok siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Manado	270 siswa siswi smk negeri 2 manado	Penelitian deskriptif dan Desain cross sectional	Berdasarkan nilai p value yaitu 0,000 yang artinya sikap tentang kebijakan KTR berhubungan dengan tindakan merokok siswa

Ahmad, Suhartini (2019) (1)	Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Perilaku Merokok Siswa Slta Di Rangkasbitung Tahun 2019	Untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terhadap perilaku merokok siswa SLTA di Rangkasbitung tahun 2019.	Sampel penelitian adalah siswa laki laki yang berjumlah 114 orang	Desain penelitian cross sectional	Ada hubungan antara keberadaan kebijakan KTR di sekolah dengan perilaku merokok dengan nilai OR= 19,677
Eviana (2020) (14)	Pengaruh Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Disiplin Masyarakat Kampus	Menganalisis pengaruh faktor-faktor implementasi kebijakan KTR terhadap disiplin masyarakat kampus.	100 responden yang memiliki kebiasaan merokok dengan metode purposive sampling.	Pendekatan kuantitatif dan desain cross sectional	Faktor-faktor penerapan kebijakan KTR berpengaruh terhadap disiplin masyarakat kampus Untag Surabaya dengan nilai sig yang dihasilkan yaitu 0,000 serta koefisien dengan arah positif sebesar 0,295.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan KTR

Penyampaian Informasi

Penyampaian Informasi yang dimaksud adalah penyebaran informasi terkait suatu kebijakan kawasan tanpa rokok. Penyampaian informasi tersebut harus dilakukan oleh pemerintah agar setiap pimpinan atau pelaksana kebijakan dapat menerapkan sesuai dengan instruksi penerapan KTR di masing masing wilayah kerja Hasil penelitian Siti Nahdiah (2021), siswa-siswi dan guru di SMPN 2 Lampihong sudah mendapatkan informasi terkait KTR melalui sosialisasi dari pihak sekolah dan dinas terkait. Tetapi penerapan KTR di SMPN 2 Lampihong belum terlaksana secara optimal, dikarenakan informasi yang di dapat belum begitu jelas dan tidak dihadiri oleh pejabat sekolah. Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik dan diterapkan sesuai dengan SOP jika instruksi dan informasi diterima dengan jelas dan tepat sasaran (15).

Kejelasan Informasi

Kejelasan penyampaian informasi dalam penerapan sebuah kebijakan adalah hal yang sangat penting. Informasi yang jelas akan merubah pengetahuan dan sikap seseorang berubah menjadi lebih baik, sedangkan informasi yang kurang jelas akan berdampak pada perilaku seseorang yang semakin bingung karena menerima informasi yang tidak jelas. Dalam penelitian Siti Nahdiah (2021) menyebutkan ada beberapa alasan penyebab penerapan kebijakan KTR tidak optimal. Informasi yang jelas akan membuat pemahaman seseorang tentang sebuah kebijakan menjadi baik dan cenderung mendukung kebijakan tersebut. Dengan adanya informasi yang jelas dan pemahaman yang baik akan menghindari seseorang dari kesalahan interpretasi serta tujuan dari penyampaian informasi tersebut dapat terpenuhi (15).

Sumber Daya

Sumber daya dalam aspek sumber daya manusia, alokasi dana dan sarana prasarana yang memenuhi banyak dijumpai di instansi atau daerah yang menerapkan kawasan tanpa rokok dengan baik dibandingkan dengan daerah yang belum menerapkan kawasan tanpa rokok atau sudah menerapkan tetapi belum optimal. Dalam penelitian Indah Pratiwi (2016) menyebutkan SMA yang menerapkan kebijakan KTR di Kota Semarang memiliki sumber daya yang baik dengan dilihat dari adanya petugas khusus yang bertanggungjawab terhadap penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah dan memiliki tugas dalam pembinaan terhadap siswa sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nizwadi Azkha (2013) tentang "Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif Di Sumatera Barat Tahun 2013" menunjukkan bahwa implementasi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana (3).

Komunikasi

Tujuan dari komunikasi adalah menyampaikan pemikiran, harapan, perasaan dan pengalaman manusia kepada orang lain. Komunikasi akan menjadi masalah jika terjadi interpretasi yang salah atau bertentangan dengan pesan yang disampaikan, dalam hal ini adalah komunikasi dalam penyampaian informasi tentang sebuah kebijakan. Sebuah instruksi, arahan atau perintah dari pelaksana kebijakan yang jelas dan konsisten akan mewujudkan penerapan suatu kebijakan yang optimal.(16) Hal tersebut didukung oleh penelitian Indah Pratiwi (2016) bahwa komunikasi yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada civitas di sekolah menentukan keberhasilan sebuah kebijakan KTR yang sudah diterapkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Andi Agus Mumang (2015) menyatakan komunikasi berhubungan dengan penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok dan keberhasilan sebuah kebijakan berpengaruh besar dari cara berkomunikasi (3).

Struktur Birokrasi

Menurut Edward (2014) Penerapan sebuah kebijakan tidak akan berjalan efektif jika tidak memperhatikan aspek struktur birokrasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam struktur birokrasi adalah hubungan antar unit serta pembagian kewenangan. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Hasil penelitian dari Fajar Ifan (2020) menjelaskan sebagian besar puskesmas di kabupaten Bongo belum memiliki struktur birokrasi yang secara khusus dalam menerapkan kawasan tanpa rokok seperti belum adanya SOP dalam penerapan KTR dan pedoman KTR. Dalam pedoman KTR yg di keluarkan oleh kemenkes 2013, KTR akan berjalan efektif jika sebuah instansi atau institusi membentuk sebuah tim khusus atau komite dalam menerapkan kawasan tanpa rokok. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Indah Pratiwi (2016) bahwa sekolah yang sudah memiliki SOP dan pedoman KTR dapat memberikan teguran kepada guru atau semua civitas akademi sekolah yang melanggar aturan tersebut. Dari beberapa hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa struktur birokrasi berupa SOP dan pedoman mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan sebuah kebijakan di sekolah (3).

Disposisi

Salah satu faktor penting dalam menerapkan sebuah kebijakan adalah disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui atau memahami sebuah kebijakan namun seorang pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan untuk menerapkan sebuah kebijakan tersebut melalui pelatihan dan sosialisasi dari dinas atau Lembaga terkait. Pelaksana kebijakan yang dimaksud adalah seluruh elemen yang berada di sebuah institusi atau instansi seperti kepala sekolah, kepala dinas dan seluruh masyarakat yang memiliki kepentingan dalam mewujudkan penerapan kebijakan KTR yang baik. Disposisi yang baik menentukan baik buruknya penerapan kebijakan KTR di sebuah instansi/institusi Berdasarkan hasil penelitian Indah Pratiwi (2016) menunjukkan peran penting kepala sekolah dan guru BK dalam mewujudkan penerapan kebijakan KTR di SMA di Kota Semarang dengan memberikan teguran dan himbauan agar tidak merokok di lingkup sekolah. Selain kepala sekolah dan guru BK, peran perangkat OSIS dalam mengimbau seluruh siswa untuk tidak merokok di lingkungan sekolah menjadi salah satu bentuk disposisi dari kelompok berkepentingan (3).

Pengetahuan Tentang Peraturan Daerah

Pengetahuan seseorang tentang peraturan daerah yang meliputi tujuan pelaksanaan dan bentuk sanksi yang diberikan menjadi faktor yang penting dalam mendukung pelaksanaan peraturan daerah. Dalam penelitian Yulyana Kusuma Dewi (2018) menunjukkan terdapat pengaruh antar pengetahuan tentang peraturan daerah dengan kepatuhan seseorang dalam mendukung terbentuknya kawasan tanpa rokok yang baik dan optimal. Pengetahuan pengelola yang baik tentang Peraturan daerah KTR meningkatkan kepatuhan pelaksanaan Peraturan daerah KTR (17).

Perilaku Merokok

Hasil penelitian Ahmad (2019) menunjukkan sekolah yang belum menerapkan KTR memiliki proporsi tinggi siswanya merokok, dibandingkan sekolah yang telah menerapkan KTR. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan KTR di sekolah berdampak positif untuk mengurangi proporsi siswa untuk merokok (1).

KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu, dari penyampaian informasi, kejelasan informasi, sumber daya yang meliputi sumberdaya manusia, sumber dana dan sarana prasarana, komunikasi, disposisi atau sikap atasan, struktur birokrasi dan perilaku merokok di kawasan tanpa rokok serta pengetahuan tentang peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Perlu dilakukannya

penetapan SOP untuk seluruh instansi dalam menerapkan kawasan tanpa rokok sehingga kebijakan KTR dapat berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Suhartini S, Ahmad A. Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Perilaku Merokok Siswa Smta Di Rongkasbitung Tahun 2019. *J Med (Media Inf Kesehatan)*. 2019;6(2):255–64.
2. Salman D, Agustang A, Yani A. Why Do People Fail to Comply with the Smoking Ban in Public Places?(The Case of Jayapura City, Indonesia). *Syst Rev Pharm*. 2020;11(10).
3. Indah Pratiwi Lumban Gaol, Kusyogo Cahyo RI. ANALISIS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SMA KOTA SEMARANG. 2016;4(3).
4. Indartuti E, Hariyoko Y. DISIPLIN MASYARAKAT KAMPUS (STUDI KASUS : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945. 2019;(2).
5. Peraturan pemerintah RI No 109 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. 2012;7(2):57–77.
6. Palallo UD, Syafar M, Amiruddin R, Indar, Yani A. Effects of adolescent attitudes on forming intention to stop smoking. *Int J Innov Technol Explor Eng*. 2019;9(1).
7. Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia 2014. Vol. 1227. 2014. 496 p.
8. Sri Wahyuni I. Implementation of Minimum Service Standards Policy At. *PubliKA JurnalFis Untan*. 2020;1–19.
9. Undang-undang No 36 Tentang Kesehatan. 2009;
10. KusumaDewi Y, Lionardo A. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. *Sriwij J Med*. 2018;1(1):8–15.
11. Nahdiah S. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI SMPN 2 LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021. Universitas Islam Kalimantan MAB; 2022.
12. Gaol IPL, Cahyo K, Indraswari R. Analisis Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di SMA Kota Semarang. *J Kesehat Masy*. 2016;4(5):321–9.
13. Mantiri N, Rumayar AA, Malonda NSH. Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dengan Tindakan Merokok Siswa Di Smk Negeri 2 Manado. *KESMAS J Kesehat Masy Univ Sam Ratulangi*. 2018;7(5).
14. Eviana E. Pengaruh Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terhadap Disiplin Masyarakat Kampus (Studi Kasus: Universitas 17Agustus 1945 Surabaya).(The Influence of Implementation Factors of Non-Smoking Area Policy on Campus Community Discipline (Case Study: University of 17 Agustus 1945 Surabaya)). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya; 2022.
15. Nahdiah S, Asrinawaty, Suryanto D. Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Smpn 2 Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2021. *J Kesehat Masy Univ Islam Kalimantan*. 2021;4:51–9.
16. Fajar FID. Studi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bungo. *J Adm Nusant*. 2020;3(2):52–61.
17. Dewi YK, Nuraini F, Lionardo A. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. *Sriwij J Med*. 2018;1(1):8–15.